

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA
LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ALFIN WIMPIEYASA
NPM. 0871010089

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

“KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN
PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN
TANJUNG PERAK SURABAYA”
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA)

Oleh :

ALFIN WIMPIEYASA
NPM. 0871010089

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Subani SH, M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP.19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

“KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN
PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN
TANJUNG PERAK SURABAYA”
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA)

Oleh :

ALFIN WIMPIEYASA
NPM. 0871010089

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada Tanggal 9 Agustus 2012
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

Subani, SH, M.Si
NIP.19510504 198803 1 001

1)
Hariyo Sulistvantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

2)
Yana Indawati, SH, M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

3)
Subani, SH, M.Si
NIP.19510504 198803 1 001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP.19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

“KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN
PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN
TANJUNG PERAK SURABAYA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA)

Oleh :

ALFIN WIMPIEYASA

NPM. 0871010089

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 30 Juli 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1)

Subani, SH, M.Si
NIP. 19510504 1988303 1 001

Hariyo Sulistyantoro, SH, MM
NIP.19620625 199103 1 001

2)

Yana Indawati, SH, M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

3)

Subani, SH, M.Si
NIP.19510504 198803 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP.19620625 199103 1 001

Surat Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfin Wimpieyasa
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya/5 Januari 1990
NPM : 0871010089
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Perum. Gunung Sari Indah Blok J No.19 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN
PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK
SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN.
SURABAYA) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan saya
(Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 12 Juli 2012

Pembimbing

Penulis,

(Subani SH, M.Si)
NIP. 19510504 198303 1 001

Alfin Wimpieyasa
NPM. 0871010089

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Alfin Wimpieyasa
NPM : 0871010089
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Januari 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN
PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG
PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID.
B/2009/PN. SURABAYA)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai kerugian kekayaan negara dengan penerapannya dalam menyalahgunakann kekuasaan secara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari literatur, perUUan dan penelitian data yang dilakukan pada Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kata Kunci : Kerugian Negara, Penyalahgunaan Wewenang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa penulis telah memberanikan diri menyajikan Skripsi ini dengan judul:

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA)

Meskipun telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk tidak membuat banyak kesalahan dalam menyusun Skripsi ini, namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari. Dan penulis harapkan segala kekurangan dan kesalahan dapat disempurnakan untuk masa selanjutnya.

Penulis yakin bahwa skripsi ini jauh lebih dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik, teguran dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang budiman demi penyempurnaan selanjutnya, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS. selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak Subani, S.H., M.Si. Selaku Ketua Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHi, M.Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu tercinta saya yang dengan sabar telah memberikan dorongan baik moril maupun materil untuk selesainya Skripsi ini.
9. Tidak lupa untuk penyemangat tersayang yang telah memberikan support dan motivasi saya dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Dan teman-teman saya, Dewi Permata Sari, Fitrah Al-Akbar, Dedi Pratama, Pancar Triwibowo, Jaka Adipura, Syaifu Rochman, Windu Bagus, Ahmad Ikhsan, Maulana Rahadi, Raditya Arga, Binar Sunu, Diana Sahbani, Nurma, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam pembuatan Skripsi ini.

Harapan penulis walaupun kecil semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Dan penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan atau kritikan dalam penyempurnaan Skripsi ini.

Surabaya, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Kajian Pustaka	8
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Korupsi	8
1.5.2 Tindak Pidana Korupsi	12
1.5.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	15
1.5.2.2 Jenis Korupsi	17

1.5.3	Penegakan Hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	23
1.5.3.1	Bentuk-bentuk Korupsi	27
1.5.4	Tinjauan Umum Perusahaan	29
1.5.4.1	Pengertian Perusahaan	29
1.5.4.2	Jenis-jenis Perusahaan	30
1.5.5	Tinjauan Umum BUMN.....	31
1.5.5.1	Bentuk-bentuk Badan Usaha	33
1.6	Metode Penelitian	34
1.6.1	Pendekatan Masalah	34
1.6.2	Sumber Bahan Hukum dan/atau Data	35
1.6.3	Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data	36
1.6.3.1	Teknik Pengumpulan Data	36
1.6.4	Teknik Analisa Data	37
1.7	Sistematika Penulisan	37
BAB II	BENTUK KERUGIAN NEGARA TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG	
2.1	Kronologi Kejadian	47
2.2	Kerugian Negara	48
2.2.1	Analisa Bentuk Kerugian Negara	51

BAB III	PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN SECARA MELAWAN HUKUM	
	3.1 Penerapan Sanksi	55
	3.2 Unsur-Unsur Korupsi Pasal yang Dikenakan Pada Para Terdakwa	57
BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan	64
	4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

This study aims to determine the terms of the loss of state assets to its application in power abuse unlawfully. This study uses the juridical-normative. Data obtained from literature sources, legislation and research data conducted in the District Court Judgments in Surabaya. The results can be concluded that the Corruption can be imposed on any person who acts unlawfully enrich themselves or another person or a corporation that may reduce all or part of the country's wealth in whatever form, are separated or not separated, which includes all the country's wealth and all rights and obligations arising from being in control, management and accountability of state Owned / Regional Owned Enterprises, foundation, corporation, and the company that includes the state capital, or capital firms that include a third party under an agreement with the state

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menngunakan bukan haknya sebagai pekerja. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Lembaga nirlaba merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tiga karakter utama yang dapat ditemukan dalam lembaga nirlaba yaitu berbadan hukum, bertujuan sosial, dan sifat kegiatannya nirlaba.¹ Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik.

Perusahaan perseroan atau Persero adalah Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara).²

¹ Dyah Hapsari Prananingrum, Suatu Analisis Yuridis Penggalangan Sumber Daya Oleh Lembaga Nirlaba, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober 2008, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, h. 183

² Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.163

Perusahaan persero adalah BUMN, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2003 menyatakan bahwa “modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”. Sementara itu dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN), namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.

BUMN Persero sebagai salah satu bentuk badan usaha yang tujuannya mencari untung merupakan badan hukum yang terpisah dan memiliki tanggung jawab yang terpisah pula, walaupun dibentuk dan modalnya berasal dari keuangan Negara akan tetapi kerugian satu transaksi atau kerugian dalam badan Hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara karena negara telah berfungsi sebagai badan hukum privat dan terhadap badan hukum tersebut berlaku juga ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Karakteristik dari suatu Badan Hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengusaha. PT

sebagai subyek hukum terpisah dari pendiri maupun pengelolanya (persona standi in judicio) termasuk kepemilikan kekayaan ada asetnya. Berarti sejak status PT sebagai badan hukum maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemegang saham dan direksi terpisah dari PT itu sendiri.

Sementara itu, mengenai kerugian yang dialami perusahaan perseroan tersebut, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 56 menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam suatu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Demikian pula, kerugian yang dialami suatu BUMN belum tentu merupakan kerugian Negara.

Adapun Negara selaku pemegang saham memang memiliki hak untuk menggugat individu Komisaris dan direksi atas keputusan mereka yang dianggap merugikan perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Akan tetapi, Negara tidak dapat menuntut individu Komisaris dengan alasan keputusan mereka telah merugikan keuangan Negara. Adalah tidak benar bila tuntutan terhadap Direksi atau Komisaris itu dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yaitu atas dasar pemikiran

bahwa harta kekayaan Badan Hukum BUMN Persero adalah harta kekayaan Negara sebagai pemegang saham.

Perlu di ingat bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam BUMN Persero bukanlah kategori kekayaan negara, hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006. Oleh karenanya terhadap kerugian saham pemerintah yang terdapat di BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara dan tidak dapat pula diajukan tuntutan Tindak Pidana Korupsi terhadap kerugian tersebut.

Pemerintah selaku pemegang saham hanya dapat mengajukan tuntutan pidana kepada Direksi dan Komisaris PT. BUMN (Persero), yaitu bila Direksi yang bersangkutan melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran Undang-undang Perbankan, pelanggaran Undang-undang Pasar modal, pelanggaran Undang-undang Anti Monopoli, pelanggaran Undang-undang Anti Pencucian Uang (Money Laundering) dan Undang-undang lainnya yang memiliki sanksi pidana.

Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Menyalah gunakan wewenang, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatannya, atau kedudukannya. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya. Seperti diketahui didalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan

pengertian melawan hukum dinyatakan tidak saja sebagai melawan hukum formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi juga termasuk perbuatan hukum materiil yang bertentangan dengan peraturan tidak tertulis yaitu perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana.

Sebagaimana yang terjadi di Pos masuk Pelabuhan Jamrud Tanjung Perak Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, perbuatan itu merupakan gabungan dari beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan yang mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara menarik uang pada setiap kendaraan truk angkutan barang yang melewati Pos masuk Pelabuhan Jamrud, yakni setiap kendaraan yang mengangkut barang dilakukan pemeriksaan surat jalan dari Ekspedisi dan wajib melampirkan uang Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) yang diselipkan dalam surat jalan tersebut tanpa melampirkan Surat Laporan Angkutan Barang (LAB) dan ditaruh dimeja pos. Dimana setiap harinya

kendaraan angkutan barang yang melewati Pos Masuk Pelabuhan Jamrud rata-rata 150 hingga 200 kendaraan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang oleh petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Perak Surabaya?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan petugas KPLP Tanjung Perak Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerugian kekayaan negara dengan penerapannya dalam menyalahgunakan wewenang secara melawan hukum oleh petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Perak Surabaya.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang timbul dari ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam penerapan ketentuan mengenai kerugian kekayaan negara dengan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam mengatur ketentuan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat dari penyalahgunaan wewenang yang terdapat di KPLP Tanjung Perak tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara dan tidak dapat pula diajukan tuntutan Tindak Pidana Korupsi terhadap kerugian tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam pembentukan suatu badan usaha baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun Badan Usaha Milik Swasta.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, Corruption atau Corruptus, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah³. Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya

³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategik dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 10

berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah. Bukan hanya kedudukan jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga dilingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak. Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary, Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others⁴.

Istilah Korupsi sebenarnya cukup luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin majunya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula yang terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti norma hukum yang ada. Kejahatan inkonvensional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari kepentingan hak asasi, ideologi negara hingga

⁴ Ibid

lainnya yang menyangkut aspek perekonomian keuangan negara. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Pada tahun 2005, menurut data Political Economic and Risk Consultancy Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia⁵. Berikut Peringkat Korupsi Indonesia,⁶

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, h. 1.

⁶ Soesilo, Korupsi Refleksi Zaman Edan, Yayasan Yusula, Malang, 2008, h.69

Peringkat Korupsi Indonesia

No.	Se-Dunia	Se-Asia
1.	Azerbaijan	Indonesia
2.	Bangladesh	Kamboja
3.	Bolivia	Vietnam
4.	Kamerun	Filipina
5.	Indonesia	India
6.	Irak	
7.	Kenya	
8.	Nigeria	
9.	Pakistan	
10.	Rusia	

*Transparency.org 2012

Menurut S. Hornby E.V. Gatenby and H Wakefield corruption is the offering and accepting of bribes (penawaran / pemberian dan penerimaan suap). Corruption is decay, yang berarti kebusukan atau kerusakan.⁷

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai

⁷ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, h.67

bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman terhadap pengertian korupsi.

Dari sudut pandang hukum, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 Pasal UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 yang dirumuskan dalam 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

1.5.2 Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan Pasal 164 KUHP, ketentuan

dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.48

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (Law in book) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindakan Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana

Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi.

Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000, dan paling banyak Rp 1.000.000.000,.”

1.5.2.1 Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik

unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

a. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara “ melawan hukum “ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara

adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

1.5.2.2 Menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 21 tahun 2001, ada beberapa jenis korupsi yang Sering Terjadi di Dalam Lingkungan Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat yaitu :

a. Korupsi yang merugikan uang negara :

1) Mencari untung dengan cara yang melawan hukum dan merugikan negara di rumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara definisi dari korupsi jenis ini sama seperti korupsi yang merugikan negara tetapi ada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Diatur dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-. Dapat dikategorikan sebuah tindakan korupsi jenis ini jika memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana;
4. Yang padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap:

1) Menyuar pegawai negeri

Suap, sogokan, uang pelicin merupakan tindakan yang bisa dianggap sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu:

1. Setiap orang;
 2. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-
- 2) Memberi hadiah ke pegawai negeri karena jabatannya.

Tindak korupsi seperti ini hampir sama seperti tindak korupsi sebelumnya karena merupakan variasi dari tindak korupsi sebelumnya perbedaannya karena menyuap seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dikarenakan jabatan atau wewenang tersebut dapat menguntungkan seseorang yang menyuap tersebut. Unsur-unsur terdapat dalam pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001:

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap telah melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Diancam hukuman maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 150.000.000,-

3) Pegawai negeri menerima suap

Dalam kasus seperti ini tidak hanya pemberi suap saja yang dianggap bersalah tetapi pegawai negeri yang menerima uang suap tersebut bisa ditangkap. Semua diatur dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 yang memiliki unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau b Diancam dengan hukuman 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-

4) Menyuap hakim

Menyuap hakim agar dapat menguntungkan pihak yang memberi suap dalam menjalankan tugasnya memimpin sidang merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur tindak korupsi tersebut menurut pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang ;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada hakim;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

5) Menyuap advokat

Menyuap advokat atau pengacara atau pembela merupakan suatu tindak korupsi. Unsur-unsur menurut pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

6) Hakim menerima suap

Merupakan suatu tindak korupsi jika seorang hakim terbukti menerima suap untuk memenangkan suatu perkara dalam sidang peradilan. Sesuai dengan pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, memiliki unsur-unsur:

1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

7) Advokat menerima suap

Advokat yang terbukti menerima suap merupakan suatu tindakan korupsi. Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut pasal 12 huruf d UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 21 tahun 2001, adalah:

1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

c. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan:

1) Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang

Merupakan suatu tindakan korupsi pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang. Perihal tersebut diatur dalam pasal 8 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, menyebutkan unsur-unsur korupsi jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tertentu;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatan. Diancam dengan penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 750.000.000,-.

2) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan administrasi memiliki arti yang beragam; mulai dari pemeriksaan keuangan sampai pemeriksaan jumlah peralatan kantor. Buku berarti banyak mulai dari laporan keuangan sampai dengan daftar peralatan kantor. Unsur-unsurnya, seperti yang disebut dalam pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
5. Diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-.

3) Pegawai negeri menghancurkan bukti

Bukti disini berupa akta, surat atau daftar yang dipakai sebagai bukti atas suatu benda atau kegiatan. Menurut pasal 10 huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, unsur-unsur dalam jenis ini adalah:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang;
5. Yang dikuasai karena jabatan.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

d. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan:

Pegawai negeri memera, Pemerasan dalam hal ini adalah pemerasan yang paling mendasar: karena pegawai negeri tersebut mempunyai kekuasaan, dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Unsur-unsur korupsi jenis ini menurut pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan:

Rekan TNI/POLRI curang, Tindak korupsi seperti ini sering terjadi dalam pengadaan keperluan TNI dan kepolisian. Korupsi jenis ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
4. Dapat membahayakan keselamatan dalam keadaan perang.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 350.000.000,-.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan;

Pegawai negeri mengikuti pengadaan yang seharusnya diurus olehnya: Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa dipilih setelah melewati

proses penyeleksian (tender). Unsur-unsur korupsi jenis ini disebut dalam pasal 12 huruf I UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja;
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda Rp. 1.000.000.000,-.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah):

Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK. Korupsi dalam gratifikasi dijelaskan dalam pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 dan 12C UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Disebutkan unsur-unsurnya adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,-.

1.5.3 Penegakkan Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat, sehingga sistem pengawasan yang dilakukan

masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi disamping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga dalam undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Disamping itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam undang-undang ini diatur mengenai pembentukan tindak pidana korupsi dilingkungan pengadilan umum. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Melihat begitu besarnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kedudukan yang independen, harapan rakyat Indonesia hanyalah tinggal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mampu menegakan peraturan Perundang-undangan di bidang Tindak Pidana Korupsi, karena instansi-instansi konvensional seperti pemeriksaan, kepolisian dan kejaksaan sudah dianggap tidak mampu lagi.

Tidak takutnya para penyelenggara negara dan birokrat serta masyarakat tertentu untuk melakukan korupsi dikarenakan ada beberapa faktor dominan yang mempengaruhinya, antara lain :

1. Tidak ada tindakan tegas dari pimpinan institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila korupsi dilakukan secara kelompok dan keinstitusian, pimpinan institusi condong untuk menutup-nutupi dan membebaskan atau bahkan dengan sengaja mengulur-ulur proses penindakan dan pelaporannya kepada penegak hukum.
2. Walaupun diproses, kecenderungan instansi selalu memberi sanksi yang ringan-ringannya yang tidak sebanding dengan akibat atau kerugian negara yang terjadi.
3. setelah dilaporkan ke penegak hukum untuk dilakukan proses peradilan , jaksa cenderung melakukan tuntutan minimal dan begitu pula hakim untuk berbuat yang sama, karena dalam proses peradilan selalu ada intervensi dari korps pegawai atau atasan yang menikmati hasil dari pelaku.
4. Dengan hasil perbuatan korupsi proses penghukuman bisa dihilangkan atau dieleminir.
5. Walaupun pahitnya proses peradilan berjalan dan vonis yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan, masyarakat menilai antara hasil korupsi dengan sanksi tidak seimbang, jauh lebih baik melakukan korupsi daripada tidak melakukan.⁹

Penerapan pembalikan beban pembuktian atau sering disebut beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas tersebut adalah untuk memberikan kesempatan seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya tidaknya menguntungkan bagi diri seorang terdakwa, atau sebaliknya

⁹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategik dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 141

dapat merugikan diri seseorang atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.¹⁰

Untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional berupa peraturan peraturan kebijaksanaan (beleidsregel, policy rule), yaitu melalui instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran No. SE-007/A/JA/11/2004, Tanggal 26 Nopember 2004. dimana Kejaksaan Agung RI setelah mencermati perkembangan dan meneliti dengan seksama laporan penanganan perkara-perkara korupsi di jajaran Kejaksaan seluruh Indonesia telah mengambil kebijakan konkret untuk mempercepat proses penanganan perkara-perkara korupsi diseluruh Indonesia.¹¹

Pelaku dalam tindak pidana korupsi, adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi yang terdiri atas :

1. mereka yang melakukan
2. yang menyuruh lakukan
3. dan yang turut serta melakukan

¹⁰ Jawade Hafidz, Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, h. 7.

¹¹ Lufsiana, Menciptakan Pemerintahan Bebas Dari Korupsi Melalui Penerapan Norma Hukum dan Asas-asas Hukum Pemerintahan Serta Peningkatan Sistem Pengawasan, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, November 2007, h.82.

4. serta penganjur¹²

1.5.3.1 Bentuk-Bentuk Korupsi

Faktor mental yang paling menentukan. Selain itu perbuatan ini tidak hanya terletak pada mental pejabat saja, tetapi juga terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi ingin menggoda oknum pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Diakui, faktor sistem juga berpengaruh. Misalnya, ancaman dan penjatuhan pidana yang relatif rendah mendorong juga orang melakukan korupsi.¹³

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan dilingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga, antara lain :

1. Transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan
2. menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah
3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang
4. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi
5. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan keuangan

¹² Loc.cit. h.31

¹³ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, h.85

6. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras
7. Mengabaikan keadilan, memberi kesaksian palsu, menahan secara tidak sah dan menjebak
8. Mencari-cari orang yang tidak salah
9. Jual beli tuntutan hukuman, vonis dan surat keputusan
10. Tidak menjalankan tugas, disersi
11. menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi
12. Jual beli obyek pemeriksaan, menjual temuan, memperhalus dan mengaburkan temuan
13. Menggunakan informasi Internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan membuat laporan palsu
14. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah
15. Manipulasi peraturan, meminjamkan uang negara secara pribadi
16. Menghindari pajak, meraih laba secara berlebihan
17. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan
18. Menerima hadiah uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya
19. Penempatan uang pemerintah pada Bank tertentu yang berani memberikan bujed yang tidak sesuai yang sebenarnya
20. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap
21. Perkoncoan, menutupi kejahatan
22. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos untuk kepentingan pribadi
23. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan
24. Memperbesar pendapatan resmi yang ilegal
25. Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan.¹⁴

¹⁴Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategik dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 45

1.5.4 Pasal yang Dilanggar Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal ini, hal yang dilanggar pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh oleh petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Perak Surabaya ialah dengan menyalahgunakan wewenangnya terdakwa melakukan perbuatan pemungutan uang kepada para sopir untuk dapat masuk pintu masuk pos jamrud.. Bila tidak memberikan uang maka kendaraan tersebut akan dikejar dan diberhentikan serta tidak diperbolehkan masuk pintu Pos Masuk Jamrud dan dipersulit untuk bongkar muatannya. Pada pintu utama jika sopir memberi uang maka akan diberi karcis, sedangkan di pintu masuk jamrud dengan membayar Rp. 2.000,- tetapi tidak diberi karcis. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan adalah melakukan pengamanan, penertiban, penegakan peraturan yang berkaitan dengan pelayaran, serta penyidikan tindak pidana pelayaran di Pelabuhan dan perairan Bandar dan tidak mengatur untuk melakukan pemungutan sejumlah uang.

1.5.5 Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri

Unsur “memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi“ terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemungutan dimana hasil pemungutan tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
2. Menyalahgunakan kewenangan dan/atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Sebagai Komandan Pos masuk Pelabuhan Jamrud tanjung Perak Surabaya terdakwa atau terdakwa-terdakwa dengan menyalahgunakan wewenang untuk menarik pungutan dari sopir truk kendaraan yang akan melewati Pos Jamrud tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik korupsi jika telah memenuhi hal-hal, antara lain:

- a. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Maka harus diartikan bahwa perbuatan “melawan hukum” dalam tindak

pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sementara yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menurut UU PTPK, pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dikaitkan dengan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 : “(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.” Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971.

Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa sebagai pelaku korupsi wajib membuktikan

sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.¹ Sehingga, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: “(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.” Namun menurut ketentuan hukum, hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara saja yang dapat dikenakan uang ganti rugi dari perampasan harta benda tersebut (oleh pengadilan).

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

a. adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi faktanya, unsur kerugian bagi negara itu sulit untuk dibuktikan karena deliknya berupa delik materiil. Namun, didalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan ada atau tidaknya kerugian bagi keuangan negara.

b. adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, lebih kepada kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif (berbuat) bukan pasif (tidak berbuat). Dengan kata lain, perbuatan seseorang baru dapat dikategorikan sebagai delik korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Sehingga, apabila terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dapat dipastikan bukan diakibatkan perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara tersebut tidak dinyatakan telah melakukan korupsi. Maksud dari memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri juga termasuk dalam pengertian korupsi.

Unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya dalam hal ini, dapat

dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Sementara maksud unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu adanya sarana atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik (sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umum) akan memiliki potensi besar untuk melakukan korupsi.

Secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan” jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Namun, pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Pada bagian penjelasannya hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak

pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

Penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal pada prakteknya masih terbatas, sehingga relatif sulit untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sampai saat ini putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas sangat sering ditemukan, utamanya mengenai pembedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” .

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur ;

1. melawan hukum atau bertentangan dengan hukum,
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
4. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan

5. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti.

1.5.4.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 no 6a dan 6b UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Dari rumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur perusahaan secara umum, yakni sebagai berikut :

a. Badan Hukum

Badan hukumnya berbentuk badan hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), Firma persekutuan komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, perusahaan perseorangan, dan koperasi.

b. Bergerak dalam bidang perekonomian

Yakni dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa yang dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Perindustrian meliputi eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan, dan penerbitan
- 2) Perdagangan meliputi kegiatan jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko, swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa
- 3) Jasa meliputi transportasi, perbankan, bengkel, jahit busana, konsultasi

c. Berlangsung terus-menerus

Sebagai mata pencaharian, tidak incidental, dan bukan pekerjaan sampingan

d. Bersifat tetap

Tidak pernah berganti atau berubah dalam waktu singkat melainkan memerlukan waktu yang lama.

e. Bersifat terbuka, terang-terangan

Ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

f. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba

Nilai lebih atau hasil menjadi tujuan yang utama.

g. Adanya pembukuan

Catatan mengenai hak dan kewajiban berkaitan dengan kegiatan perusahaan seperti neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening, jurnal, dan transaksi harian.

h. Ada akta atau izin usaha terdaftar di notaries

Undang-undang wajib daftar perusahaan dan Pemda untuk pedagang biasa.

i. Harus ada buruh

Adanya pekerja dan pengusaha yang akan menjalankan perusahaan.¹⁵

1.5.4.2 Jenis-jenis Perusahaan

Berkaitan dengan definisi perusahaan tersebut, maka pembagian perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta tersebut memiliki 3 macam bentuk, yaitu :
 - a. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta warga Negara Indonesia
 - b. Perusahaan swasta asing, yaitu perusahaan swasta milik warga negara asing
 - c. Perusahaan swasta campuran, yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga negara asing. Perusahaan swasta milik warga Negara asing yang dimaksud disini adalah:
 - Perusahaan yang termasuk dalam cabang perusahaan yang berbadan hukum atau berbentuk hukum lainnya, dari perusahaan

¹⁵ Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.100

yang dipegang oleh satu atau beberapa pemegang saham atau pesertanya tidak berkewarganegaraan Indonesia.

- Perusahaan yang termasuk dalam cabang usaha perniagaan yang tidak dimiliki oleh warga Negara asing.
- 2) Perusahaan Negara, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Indonesia.¹⁶

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam Pasal 1 Perpu Nomor 19 Tahun 1960 hanya disebutkan, Perusahaan Negara (PN) adalah, Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Dalam Perpu belum digunakan Badan Usaha Milik Negara. BUMN baru digunakan dalam Perpu No.3 Tahun 1983 Pasal 58 disebutkan :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Perjan, Perum dan Persero, menteri dibantu oleh suatu sekretariat yang disebutkan Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara
- 2) Biro Tata Usaha Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal departemen yang bersangkutan

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Maksud dan Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara adalah:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya
- 2) Mengejar keuntungan

¹⁶ Ibid, h.98

- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN di Indonesia memiliki misi dan tujuan yang berbeda dengan perusahaan swasta, sehingga persoalan dan tantangan BUMN terutama harus dilihat dari segi kemampuannya dalam mengemban misi dan tujuan penyelenggaraannya. Misi yang diemban oleh BUMN meliputi antara lain, penyelenggaraan kemanfaatan berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, menyelenggarakan kegiatan usaha yang berusaha melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, dan turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.¹⁷

Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMN menjadi makin berat dengan adanya berbagai permasalahan eksternal, seperti lemahnya nilai tukar mata uang rupiah, tingkat inflasi yang tinggi, neraca perdagangan yang tidak seimbang, risiko politik, peraturan yang tidak stabil, kurangnya tekanan untuk melakukan kegiatan secara

¹⁷ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero*, PT. Alumni, Bandung, 2012, h.57

lebih efisien atau meningkatkan kemampuan teknologi.¹⁸ Demikian seterusnya, lingkaran setan pemiskinan ini dilaksanakan secara sistematis, bias-bisa sampai ludes BUMN yang ada di Negara kita APBN masih saja defisit.

1.5.5.1 Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara terdiri atas :

1) Perusahaan Persero

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (Pasal 1 butir 2 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)

Maksud dan tujuan pendirian persero adalah, Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing. Kuat, baik dipasar dalam negeri maupun internasional. Serta memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.¹⁹

2) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

¹⁸ Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h.42

¹⁹ Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.164

perusahaan.(Pasal 1 butir 4 UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

Maksud dan tujuan Perusahaan Umum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola perusahaan.²⁰

3) Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation atau bahasa Belanda cooperatie, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai untuk perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan.²¹

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang bertumpu pada norma hukum atau kaidah hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

²⁰ Ibid, h.165

²¹ Ibid, h. 167

mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²²

1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah
 1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor. 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

²² Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

1. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum.
2. Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero.
3. Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum.
4. Farida Hasyim, Hukum Dagang.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Korupsi.
6. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum.
7. Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN.
8. Soesilo, Korupsi Refleksi Zaman.
9. Surachmin, Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi.
10. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan/atau Data

1.6.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara menghimpun, dan mempelajari data sekunder.

b. Wawancara

Guna memperoleh data primer, dilakukan pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan suatu tanya jawab secara langsung dilakukan secara sistematis tentang masalah Kerugian Negara Yang Diakibatkan Dari Proses Penyalahgunaan Wewenang Terhadap BUMN (Ditinjau dari UU No.31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah

Dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Bab II, dalam bab ini penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang tema proposal untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya yang relevan dengan pokok bahasan yaitu menerangkan kronologis kejadian penarikan pungutan yang dilakukan oleh petugas Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Perak Surabaya, kemudian akan diuraikan jumlah kerugian negara yang timbul akibat dari

tindakan pungutan liar, kemudian akan menguraikan analisa bentuk kerugian negara yang timbul dari tindakan penyalahgunaan wewenang.

Bab III, penulis mencoba memaparkan mengenai penyajian data dan pemecahan masalah yang pada prinsipnya adalah sebagai salah satu alternatif jalan keluar dari permasalahan yang dibahas pada proposal ini. Meliputi uraian Putusan Pengadilan Negeri, kemudian akan timbul suatu analisa putusan penerapan sanksi terhadap pelaku dalam menyalahgunakan kekuasaan secara melawan hukum.

Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan usulan-usulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan proposal ini.